

**PARADIGMA PENDIDIKAN  
BERBASIS MASYARAKAT  
(COMMUNITY BASED EDUCATION)**

Oleh

**Halimatun Syakdiah  
Dosen Tetap Prodi PAI UNIVA**

**Abstract**

All educational activities that are currently developing basically have a goal of involving all components of education including the community. However, in reality the community lacks a proper place as a subject that plays an important role in every education policy. What's more, many people are used as objects and tools to reap profits. In fact, the contribution of the community is so clear and tangible in supporting efforts towards overall educational goals. On that basis, it is necessary to develop an education paradigm based on the community. an Education Paradigm that will reunite formal educational institutions with informal real-life communities. Thus formal and informal education is not just a story, but a complete reality. Thus, a learning society will be created.

**Keyword: Pendidikan dan partisipasi masyarakat**

**Pendahuluan**

Sejarah peradaban bangsa-bangsa modern tidak pernah lepas dari proses pendidikan bangsanya, bahkan wacana pendidikan selalu saja menarik minat masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai kalangan seringkali memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sejumlah permasalahan yang menarik, oleh karena pendidikan merupakan salah satu modal dasar penentu peradaban masa depan, dan disinilah peran pendidikan sebagai laboratorium rekayasa insaniyah menuju masyarakat dan bangsa yang berperadaban tinggi. (Gema, Edisi 1 agustus 1999)

Dengan demikian, dinamika sebuah peradaban sangat ditentukan bagaimana melibatkan peranan pendidikan, sungguhpun dalam format dan kapasitas yang sederhana. (Suwendi, 2000:137) Olehnya itu, dalam konteks pendidikan pemanusiaan mengharuskan kita melakukan refleksi filosofis tentang hakekat manusia. Kerena sebenarnya titik sentral pendidikan adalah manusia. Maka dalam konteks ini pendidikan memfungsikan dirinya sebagai wacana

intraktif antara manusia dan masyarakat serta lingkungannya.

Dengan meminjam tipologi Paulo Freire pernah mengatakan bahwa pemanusiaan selalu menjadi problem pokok manusia, dan kini persoalan itu harus dipedulikan sungguh-sungguh. Termasuk dalam dunia pendidikan, khususnya di negeri ini dilanda kegelisahan. Sistem pendidikan yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan nasional dan era globalisasi dewasa ini. Suyanto dan Hasyim, mengatakan bahwa millenium ketiga benar-benar berada pada tingkat persaingan global yang sangat ketat. Artinya siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan kualitas alami, akan tersingkir dengan sendirinya. (Suyanto dan Djihar Hasyim, 2000: 2)

Karena itu, perlu dilakukan reformasi pendidikan dari waktu ke waktu tanpa henti-hentinya. Namun ketika reformasi digulirkan maka perlu mengingat atau memperhatikan metafora John F.Kennedy yang dikutip oleh Hujair AH, yaitu *Change is way of life. Those who look to the past or present will*

*miss the future*. Metafora ini, menurut Suyanto, pantas diterjemahkan dalam kepentingan reformasi pendidikan kita. Dengan kata lain, melakukan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global. Hal ini semua patut direnungkan untuk melakukan introspeksi: apakah bangsa kita sudah yakin memiliki kemampuan yang dituntut dalam persaingan global pada milenium ketiga. (Hujair AH Sanaky, 2001:34)

Sekarang ini muncul kekerasan, tawuran antar pelajar, warga masyarakat, aparat dengan warga, siswa terlibat narkoba dan berbagai macam bentuk perilaku kekerasan, sehingga menggambarkan bangsa ini sedang sakit dan membutuhkan dokter spesialis untuk mengobati. Tampaknya ada yang “salah” dari agenda reformasi pendidikan, apakah sistem pendidikan yang salah karena hanya membentuk manusia-manusia yang tidak mampu. (Soleh Solahuddin, 1998:303) menjadi beban dan brutal ataukah eksekusi dari kebijakan dan praktik pendidikan di masa “rezim Orde Baru” yang otoriter, sehingga telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif.

Para praktisi pendidikan mencoba melakukan reformasi pendidikan melalui Undang-Undang pendidikan Nasional yang lebih menitikberatkan peran pendidikan berbasis masyarakat sebagai komponen yang penting dari sistem pendidikan nasional. (Suyanto, 2001: 1) Dengan demikian, tulisan ini akan membahas tentang pendidikan yang berbasis masyarakat. Permasalahannya yang patut dilemparkan dan kemudian dijawab meliputi: 1) Apakah yang dimaksud pendidikan yang berbasis masyarakat, 2) Sejak kapan pendidikan berbasis masyarakat, 3) faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung pendidikan yang berbasis masyarakat.

### **Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM)**

Wacana Pendidikan berbasis masyarakat merupakan dua variabel yang

tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Karenanya pendidikan yang berbasis masyarakat adalah pendidikan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan. Tamsilnya ialah bila salah seorang anggota keluarga sakit, maka semua ikut merasakan sakit, sekurang-kurangnya prihatin. Begitulah selayaknya yang terjadi dalam dunia pendidikan. Menurut Abuddin Nata, bahwa untuk mewujudkan misi pendidikan seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, metode, sarana, dan prasarana harus dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (sosial). (Abuddin Nata, 2001:101)

Menurut Michael W. Galbraith yang diikuti Zubaidi pendidikan masyarakat adalah proses pendidikan dimana individu (dalam hal ini orang dewasa) menjadi lebih kompeten dalam hal keterampilan sikap dan konsep, sebagai upaya untuk dapat hidup di dalam masyarakat dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakat tersebut lewat partisipasi demokrasi. (Zubaidi, 2006:132) Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya menekankan bagaimana masyarakat mempunyai peran atau ikut serta memecahkan masalah pendidikan yang ditangani oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat ikut dilibatkan dalam merumuskan visi, misi, tujuan program pendidikan. Dalam hubungan ini ‘Ali Khalil Abû al-‘Ainain menyatakan: *Pendidikan merupakan proses sosial. Karena itu, pendidikan dalam suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri* (Abu al-‘Ainain, ‘Ali Khalil, 1980:51).

Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Ia harus timbul dari dalam masyarakat itu sendiri. Ia adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara

tersebut.(Shihab, M. Quraish Shihab, 1992:175)

Sejalan dengan itu Ibn Khaldûn pernah berkata bahwa sesungguhnya ilmu dan ajarannya itu merupakan amal sosial yang khusus ditujukan kepada manusia, karena memang keduanya berada di dalam kehidupan peradaban umat manusia, yang dalam kehidupan primitif tidak terwujud, (Ali Al-Jumbulati, 1994: 218; Hasan Langgulung, 1985: 27). Sehubungan dengan itu, Indra Djati Sidi, misalnya berpendapat bahwa pendidikan sekolah tidak lagi diartikan secara formal melainkan juga berada di mana-mana, terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sehingga semua potensi yang ada dalam kehidupan tersebut menjadi sarana dan media pembelajaran. Suasana semacam inilah yang memberikan iklim yang kondusif bagi lahirnya masyarakat belajar (*learning society*). (Indra Djati Sidi, 2001:3-9) Sejalan dengan itu, Al-Jufri B. Syarif juga cukup dilanda kegelisahan karena melihat kenyataan bahwa pembaharuan pendidikan di Indonesia bukan memecahkan masalah fundamental. Selain itu, ia juga resah karena isu pembaharuan pendidikan hampir selalu datang dari pengambil keputusan dan bukan dari lapangan, peserta didik dan guru. Zamroni menilai bahwa proses pendidikan yang ada cenderung tidak demokratis dan ini akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan kreativitas.(Aljufri B. Syarif, 1996: 15. 177)

Menyangkut relevansi pendidikan, Suyanto mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia juga masih mengalami masalah dalam hal relevansinya dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat. Prof. Winarno mengatakan bahwa dulu pemerintah hanya meminta partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, tetapi tidak pernah mengatakan kepada masyarakat bahwa ini pendidikanmu. Tidak heran jika kemudian masyarakat kurang peduli dengan bidang pendidikan. Padahal untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional, tidak bisa tidak, pengelola pendidikan harus diserahkan dan dikembalikan kepada masyarakat.(Media

Indoensia, 22 Mei 2002) Pengembalian pengelolaan pendidikan kepada masyarakat menuntut prasyarat ekstensial, yaitu lahirnya masyarakat belajar Indonesia. Untuk itu, reformasi pendidikan nasional harus didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang demokratis. (H.A.R. Tilaar, 1998:19)

Keharusan masyarakat terlibat dalam masalah-masalah pendidikan tersebut sebenarnya sudah menjadi peraturan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I, ketentuan umum, pasal I butir 10 misalnya dinyatakan bahwa sumber daya pendidikan adalah dukungan dan penunjang pelaksana pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia yang digunakan serta diberdayakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah baik sendiri maupun secara bersama-sama.

Namun, kenyataannya akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah. Karena terlalu kuatnya dominasi pemerintah terhadap penyelenggaraan sekolah secara sistematis telah memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat. Kedudukan masyarakat dan orang tua hanya sebagai kosumen pendidikan dengan segala kepentingan diabaikan. Kepala sekolah yang selama ini telah dibina oleh pemerintah menjadi birokrat-birokrat kecil yang lebih takut kehilangan jabatan daripada kegagalan mencapai harapan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Hal ini diperburuk oleh iklim birokrasi pemerintahan yang tidak kondusif untuk berprestasi.(Indra Djati Sidi, 31.)

Oleh karena itu, para pemikir menilai bahwa pendidikan di Indonesia ternyata cenderung menghasilkan pendidikan ke arah sistem yang bersifat birokrasi sentralistik. Berbagai kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat cenderung sebagai "Sabda Padita Ratu", yang mesti dilaksanakan di daerah-daerah.(Suwito, 2002) Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kemestian penyeragaman pakaian

sekolah, penyeragaman kurikulum, menunjukkan sistem pendidikan tersebut menjadikan “keseragaman” sebagai tujuan. (Darmaningtyas, 1999:125-129) Hasil kebijakan yang demikian akan menghasilkan manusia-manusia yang selalu dalam bayang-bayang ketakutan dan khawatir sehingga harus patuh dan tunduk pada perintah yang ada, betapapun anehnya perintah tersebut.

Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi dalam bukunya *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi* memberikan deskripsi tentang pentingnya demokrasi dalam dunia pendidikan dengan harus mengedepankan kebebasan dan keadilan yang bisa dinikmati bersama tanpa harus diskriminasi. Karenanya tanpa demokrasi akan mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan itu sendiri. (Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, 2001:90) Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan ras (suku) kepercayaan, warna, dan status sosial. (Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, 2001:91) Dan tujuan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan masyarakat (sosial) inilah pendidikan yang berbasis masyarakat.

Pendidikan Islam mengakui secara tegas bahwa peranan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu, sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh bagi memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. (Samsul Nisar, 2001:131) Untuk itu, pendidikan harus mampu mengakumulasi seluruh potensi dan nilai kebudayaan suatu masyarakat dan sistem pendidikan. Dengan konsep dan upaya kondusif ini, baik masyarakat maupun lembaga pendidikan, akan merasa saling memiliki dan bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya proses pendidikan, dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Pendidikan dalam pemahaman Islami, bukan suatu yang terpisah dari masyarakat. Bahkan pokok-pokok dan pelaksanaannya, selamanya

mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Ini berarti bagian dari proses memberi dan menerima. (Muhammad Jamil Khayya, 1989:136)

Konsep pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya bagaimana menggali potensi-potensi yang positif untuk diintegrasikan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, akan lahir komunitas pendidikan (*Education Community*) yang akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan-gagasan mengenai jenis sekolah yang diinginkan oleh masyarakat dan bangsa. (Sindu Nata, (ed), 2000:29) Sketsa tersebut, dapat dipahami bahwa konsep pendidikan yang berbasis masyarakat merupakan konsep yang menyatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis. Seluruh komponen baik kurikulum, metode, guru, anak didik, sarana dan prasarana, harus dirancang untuk kepentingan masyarakat. Bahkan seluruh komponen bangsa yakni pemerintah, sekolah, masyarakat saling bekerja sama untuk mencapai masyarakat belajar.

Berdasarkan pandangan di atas, maka peran pendidikan Islam mestinya bukan hanya “dipahami dalam konteks mikro untuk kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan, melainkan juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya” (Fasli Jalal, 2001:16-17) sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat [*learning society*]. Brubacher dalam bukunya, *Modern Philosophies of Education* [1978], menyatakan hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik dan negara, karena pendidikan itu terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kenegaraan secara simultan.

Sedangkan, secara mikro pendidikan senantiasa memperhitungkan individualitas atau karakteristik perbedaan antara individu peserta didik, dalam kerangka interaksi proses belajar.

Landasan hukum PBM adalah UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 55 tentang pendidikan berbasis masyarakat, yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/pemerintah daerah.
5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip relevansi, yaitu bagaimana materi program pendidikan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat ikut serta dalam dunia pendidikan. PBM merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan,

implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja sekolah. Upaya melibatkan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat pada level operasional melalui komite (dewan sekolah). Komite ini terdiri dari kepala sekolah, guru senior, wakil orang tua, tokoh masyarakat dan perwakilan siswa. (Kumanana dan JM.Muslimin, (ed), 2008:314.)

### **Sejarah Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat secara historis sudah dilaksanakan dengan menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai motivator bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang lahir dan berkembang karena adanya al-Qur'an sebagai motivator. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam hasil inisiatif masyarakat dan muncul dalam berbagai model. Stanton misalnya menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut antara lain *Kuttab, Mesjid, Madrasah*. (Charles Michael Stanton, 1994:14-15) Hasan Abd'al juga melakukan penelitian khusus mengenai institusi-institusi pendidikan Islam abad keempat hijriyah, menyebut bahwa institusi tersebut meliputi: *al-Kuttab, al-Mesjid, Hawanit, al-Maraqim, Manazil al-Ulama, al-Salun, al-Adabiyah, Duat al-Kuttub wa Daur al-'Ilm al-Madrasah*. (Maksum, 1999:53)

Lembaga pendidikan kuttab suatu pendidikan dasar yang diberikan sebelum mereka masuk ke lembaga mesjid. Menurut Izzuddin Abbas yang disadur Hasan Langgulung ada dua macam kuttab: *pertama*, untuk anak-anak orang kaya yang membayar iuran pendidikan. *Kedua*, untuk anak-anak orang miskin yang disebut kuttab *al-Sabil* (pondok orang dalam perjalanan). Di sini pendidikan cuma-cuma bertujuan menyiapkan murid-murid pada lingkaran (halaqah) mesjid-mesjid atau berbagai sekolah yang didirikan pada zaman Abbasiyah. (Hasan Langgulung, 2000:123)

Mesjid sebagai lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pokok pada zaman Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin. Ketika ilmu-ilmu asing memasuki masyarakat Islam,

pusat pengkajiannya di mesjid dan harus dipelajari bersama-sama dengan ilmu agama. (A. Hasyim, 1995:146.) Mesjid di samping, sebagai fungsi utamanya untuk tempat ibadah, juga menjadi sentral kegiatan masyarakat muslim. Masyarakat muslim pada masa-masa awal telah memperluas fungsi mesjid. Mereka menjadikan mesjid sebagai tempat untuk beribadah, lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi tentara, rumah penyambutan para duta, dan yang paling umum dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Di Baghdad pada masa itu, terdapat beribu-beribu mesjid diberbagai tempat. Para penguasa seperti Adud al-Daulah (w. 965), al-Sahib bin 'Abbad (w. 995), dan Da'ilil al-Sijitani (w. 9691) merupakan pelopor yang mendukung perkembangan mesjid dan pendidikan, atau dengan istilah Nicholas Hans, mesjid dianggap sebagai universitas Islam pertama. Kemajuan ini dicapai oleh masyarakat Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga-lembaga pendidikan lain mulai yang dalam dunia Islam adalah *Dar al-Hikmah*, yang tersiar di berbagai dunia Islam, seperti Meusil, Cairo, Fustat, dan Hilb.

Di samping lembaga-lembaga tersebut di atas, muncul juga lembaga-lembaga pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya dari lembaga-lembaga tersebut, yang diwujudkan oleh suasana kehidupan zaman Abbasiyah, begitu juga dengan kemajuan ilmiah, kemakmuran ekonomi, yang disaksikan di zaman ini, seperti istana-istana, beberapa perpustakaan, dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut tidak mengenal tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu. Tidak ada tingkatan rendah atau permulaan, menengah dan lain-lain, tetapi hanya mengenal satu tingkatan saja yang dimulai dengan kuttab atau guru-guru khusus dan berakhir di diskusi berseri (*halaqah*) di mesjid. Juga tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat Islam. Kadang-kadang kuttab sekedar mengajarkan membaca dan menulis al-Qur'an, kadang juga mengajarkan bahasa, nahwu dan *'aurad*. Setiap guru mempunyai metode tersendiri. Di

mesjid-mesjid besar terdapat beberapa halaqah untuk berbagai pelajaran. Para siswa bebas mengikuti pelajaran. Para siswa bebas mengikuti dan memilih halaqah dan guru yang disukai. Setelah tamat pada seorang guru, ia berpindah ke guru lain. Juga tidak ada ijazah atau gelar ilmiah yang diberi kepada orang yang menamatkan pelajaran sesudah ujian. Akan tetapi ada ujian-ujian pendapat atau pemikiran sekitar yang dipelajari itu, dari guru-guru dan ulama. Kegiatan ini diistilahkan *Munadlarah*. Di masa ini pula sebagai zaman keemasan dunia Islam, berkembang ilmu pengetahuan dan lahirnya intelektual dalam berbagai bidang.

Madrasah merupakan sistem pendidikan Islam dan merupakan era baru bagi institusi pendidikan Islam. Madrasah sudah merupakan salah satu organisasi resmi negara, sehingga dengan berdirinya sistem madrasah, maka madrasah berpisah dengan mesjid.

Ada tiga teori yang menimbulkan munculnya madrasah. *Pertama*, karena kegiatan pendidikan di mesjid dianggap telah mengganggu fungsi utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. *Kedua*, karena berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. *Ketiga*, karena timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan. (Maksum, 55-56)

Pembentukan madrasah telah dimulai pada awal abad ke-9, sekolah tinggi yang sebenarnya ternyata baru pertama kali didirikan di Naisabur Iran, pada awal abad ke-11. (Ahmad Djaunari, 2000:80) Namun yang paling terkenal yang hingga saat ini menjadi model sistem pendidikan madrasah keseluruhan, dibangun pada tahun 1057 oleh Nizam al-Mulk di Baghdad, dikenal sebagai madrasah Nizamiyah. Karena kemasyhurannya madrasah ini meluas dan merangsang pertumbuhan institusi yang sama. Ensiklopedi Islam menuturkan: "Antusias dan energi Nizam al-Mulk di memberi arti awal periode baru kejayaan madrasah, Sultan dan kaum pria yang berkedudukan tinggi kini tertarik pada madrasah dan tipe yang dikembangkan

secara perlahan-lahan oleh Nizam al-Mulk ini kemudian menjadi lebih lazim dengan model pendidikan memasukkan siswa ke asrama. (*Ensiklopedi Islam*, Vol.4:354)

Selama berabad-abad beberapa universitas Islam memimpin kegiatan intelektual dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan prestasi terbaik muslim klasik. Madrasah atau al-Jami'ah dibuka untuk umum dan menjadi pusat pendidikan internasional. Lebih dari itu, pengawasan tertinggi madrasah dipegang oleh ulama dan cendekiawan muslim yang memberikan lingkungan belajar secara individual dan personal. Inilah desentralisasi dalam dunia pendidikan. (Azyumardi Azra, 2000:24-25)

Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang terdiri dari berbagai model ini membuktikan bahwa secara historis pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan umat Islam sudah mempraktekannya. Suasana inilah yang menyebabkan umat Islam sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan berbagai bidang lainnya. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan juga dapat dijumpai pada masyarakat di Indonesia, sebelum pemerintah mendirikan madrasah, umat Islam telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti *Surau*, *Rangkang*, *Langgar*, *Pesantren*, *Madrasah*, dan *Sekolah*. Institusi-institusi tersebut lahir dari peran aktif masyarakat dalam bidang pendidikan. (Abuddin Nata, (ed), 2002:100) Dari lembaga-lembaga inilah, lahir tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Hamka, KH. Abdullah Ahmad, KH. Hasyim Asy'ari, KH Imam Zarkasyi dan beberapa tokoh lainnya. (Mahmud Yunus, 1996)

Pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam di atas, dalam berbagai bentuk dan coraknya, merupakan upaya pendidikan berbasis masyarakat secara terbuka, sampai muncul pesantren, lembaga pendidikan Indonesia cenderung eksklusif. Bahkan pada zaman penjajahan, sekolah-sekolah pada mulanya didirikan untuk kalangan bangsawan dan kaum penjajah. Baru setelah adanya desakan gerakan

pencerahan dan perjuangan kalangan terdidik Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah-sekolah rakyat yang lebih terbuka. Hal ini berbeda dengan pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam semula bersifat terbuka bagi masyarakat luas. (Karel A. Steenbrink, 1986)

Uraian singkat di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa ekstensi dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia berasal dari proses interaksi misi Islam dengan tiga kondisi: *Pertama*, pergumulan dengan budaya lokal pra Islam melahirkan pesantren. *Kedua*, interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern telah menghasilkan lembaga madrasah. *Ketiga*, interaksi Islam dengan politik Hindia Belanda telah membuat sekolah Islam. (Husni Rahim, 2001:8).

Sejarah telah menuliskan bahwa ternyata masyarakat telah mampu mendirikan, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Di samping itu, lembaga yang lahir secara mandiri telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan. Hal ini sebenarnya menjadi renungan dan pemikiran di tengah arus reformasi, di mana kemampuan pemerintah amat terbatas, maka konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan alternatif yang perlu mendapat dukungan, dan realisasi.

## **Hambatan dan Dukungan**

### **1. Hambatan**

Hambatan yang diperkirakan akan muncul berkenaan dengan pendidikan berbasis masyarakat ini paling kurang ada tiga. *Pertama*, secara finansial dunia pendidikan pada umumnya sudah terbiasa memperoleh subsidi dari pemerintah. Dengan kata lain, para penyelenggara pendidikan pada umumnya sudah terbiasa dimanjakan pada masa Orde Baru. *Kedua*, secara umum ekonomi masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, sebagai akibat dari sulitnya lapangan pekerjaan, tidak mempunya untuk berkompetisi serta kurangnya kemampuan untuk memperbaiki ekonominya. Dalam kondisi demikian, agak sulit masyarakat

untuk mempunyai peran ekonomi dalam mendukung konsep pendidikan yang berbasis pada masyarakat. *Ketiga*, secara umum penyelenggaraan pendidikan kurang memiliki kemampuan, kemauan, keterampilan, dan strategi dalam menggali dana dari masyarakat, sebagai akibat kurangnya pengalaman melobi orang-orang yang memiliki modal atau pihak-pihak para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan. (Abuddin Nata, Vol.2, No.2:194)

## 2. Dukungan

Pendidikan berbasis masyarakat juga mempunyai faktor pendukung yaitu: *Pertama*, motivasi keagamaan. Masyarakat Indonesia yang umumnya beragama Islam, meyakini bahwa setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan wajib mengajarkan kepada orang lain. *Kedua*, dari sekian masyarakat Indonesia yang beragama Islam, sudah banyak tergolong mampu dan berkecukupan dengan berbagai keahlian dan profesi yang beragam. Di antara mereka ada yang tergolong sebagai pengusaha besar yang berhasil, pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan strategis.

Mereka memiliki fasilitas yang melebihi kebutuhan hidupnya, seperti rumah, tanah, kendaraan, pabrik, lembaga pendidikan dan sebagainya. Kondisi yang dimiliki umat Islam jika didayagunakan dan diintegrasikan ke dalam dunia pendidikan akan dapat membantu memperlancar pelaksanaan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. *Ketiga*, di kalangan masyarakat Islam sendiri saat ini sudah banyak yang berhasil menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dengan hasil yang dapat dibanggakan. Banyak lembaga pendidikan Islam swasta yang cukup memiliki kredibilitas. Keadaan yang demikian itu dapat mendukung pelaksanaan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat, manakala mereka mau membantu lembaga pendidikan Islam swasta yang belum maju.

## Penutup

Berdasarkan uraian dari lembaran awal sampai akhir, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa konsep pendidikan

berbasis masyarakat adalah konsep yang menggali seluruh potensi yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan masyarakat dalam masalah-masalah pendidikan. Konsep ini mengharuskan adanya lembaga yang bersifat demokrasi, di mana seluruh komponen pendidikan harus mempertimbangkan kepentingan dan tuntutan masyarakat (sosial), agar tercipta masyarakat belajar (*learning society*).

Secara historis pendidikan berbasis masyarakat sudah dipraktekkan umat Islam pada zaman klasik, termasuk umat Islam di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan hasil dari usaha masyarakat sendiri. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah berhasil mendorong peran masyarakat, sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai kredibilitas yang bisa diperhitungkan. Pelaksanaan konsep pendidikan berbasis masyarakat sebenarnya sudah tersedia pada masyarakat. Tinggal kerjasama antar masyarakat itu sendiri dan lembaga-lembaga yang berhasil membantu lembaga pendidikan yang tertinggal serta dibarengi dengan keteguhan untuk mewujudkan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. rwujudnya konsep pendidikan berbasis masyarakat tersebut merupakan usaha yang mulia dan harus menjadi gerakan nasional, bahkan konsep inipun menjadi tujuan agenda reformasi [].

## Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi, 2000. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos.
- A.Hasyim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Darmaningtyas, 1995. *Pendidikan pada dan setelah Krisis Evaluasi di Masa Krisis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Djati Sidi, Indra, 2001. *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta, Paramadina.

- Djaunari, Ahmad, 2000. *Pendidikan dan Modernisasi di Dunia Islam*, Surabaya, al-Ikhlash.
- Ensiklopedi Islam*, Vol.4, Leiden, E.J. Brill, 1913-2938, III.
- Gema*, Edisi 1 agustus 1999.
- Jalal ,Fasli, 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Adicita.
- Khayya, Muhammad Jamil, 1989. *al-Nazriyah al-Tarbawiyah fi al-Islami*, Makalah al-Safa.
- Kompas* 17 April 2002.
- Kumanana dan JM.Muslimin, (ed), 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, IAIN Indonesia Social Equity Project (IISEP).
- Langgulong, Hasan, 2000. *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta, al-Husna Zikra.
- Maksum, 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos.
- Media Indoensia*, "Privatisasi Sekolah Era Otonomi", 22 Mei 2002.
- Michael Stanton, Charles, 1994. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, Jakarta, Logos.
- Mochtar, Affandi, 2001. *Membedah Diskursus Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalimah.
- Nata, Abuddin, (ed), 2002. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_, 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta, Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual "Jauhar"*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2001, Vol.2, No.2.
- Nata, Sindu,(ed), 2000. *Menggagas Paradima Baru Pendidikan demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta, Kanisius.
- Nisar, Samsul, 2001. *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta, Media Pratama.
- Rahim, Husni, 2001. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana.
- Sanaky, Hujair AH "Reformasi Pendidikan Suatu Keharusan untuk Memasuki Milenium III," *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dib*, Yogyakarta, No. 04, Maret 2001.
- Solahuddin, Soleh, 1998. *Urgensi Reformasi Pendidikan Nasional dalam Menuju Indonesia Baru Menggagas Reformasi Total*,(ed), Musa Kazhim, Pustaka Hidayat.
- Steenbrink, Karel A., 1986. *Madrasah, dan Sekolah*, Jakarta, LP3ES.
- Suwendi, Konsep Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari, *Jauhar Vol, 1, Desember, 2000*.
- Suwito, *Pendidikan Yang Memberdayakan*, dalam Orasi Pengukuhan sebagai Guru Besar, 3 Januari 2002.
- Suyanto dan Djihar Hasyim, 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia Memasuki Melinium III*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.

- \_\_\_\_\_, 2001. *Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Depertemen Pendidikan Nasional Badan Peneliti dan Pengembangan.
- Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, 2001. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, Malang, Universitas Muhammadiyah.
- Syarif, Aljufri B., 1996. *Pendidikan Indonesia;Aspek yang Terlupakan*. Zamroni, *Menuju Praktek Pendidikan Egaliter Demokratis*, Jakarta, IKIP Muhammadiyah Press.
- Tilaar, H.A.R., 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang, Tera Indonesia.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, Sinar Grafika 1993 Cet IV.
- Yunus, Mahmud, 1996. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung.
- Zubaidi, 2006. *Pendidikan Berbsis Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.